

Peluncuran
Forum Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Berkelanjutan –
Sustainable Rural and Regional Development Forum Indonesia (SRRED-FI)

Jakarta, 23 Mei 2013

Notulensi

1. Laporan Ketua Panitia

Oleh : Iman Sudrajat, Dirjen Penataan Ruang Wilayah Nasional

Keinginan untuk membentuk forum ini sudah sejak diterbitkannya roadmap penyelamatan ekosistem pulau sumatera. Dari beberapa kali pertemuan, dirasakan diperlukan adanya wadah untuk menjembatani, untuk menyamakan visi, persepsi dan komunikasi di antara para pelaku.

Kebutuhan ini didasarkan pada upaya pelaksanaan Perpres 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera dan *roadmap* Penyelamatan Ekosistem Pulau Sumatera yang mana perlu diperluas pada implementasi yang lain pada penyelamatan hutan, lahan pertanian untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan, pengembangan agropolitan, minapolitan atau bentuk-bentuk pengembangan perdesaan lainnya.

Salah satu kesepakatan adalah perlunya dibentuk suatu forum penyelenggaraan penataan ruang yang melibatkan semua pihak untuk mewujudkan pengembangan wilayah dan perdesaan yang berkelanjutan.

Untuk menandai lahirnya forum ini, maka dilaksanakan kegiatan peluncuran Forum Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Berkelanjutan atau *Sustainable Regional and Rural Development Forum Indonesia (SRRED-FI)* sebagai awal kegiatan sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat .

Diharapkan peserta dapat memaknai dan memperoleh manfaat dari keberadaan forum ini sehingga turut berperan aktif untuk mendukung keberlanjutan forum ini.

Dalam acara ini kami mengundang peserta dari unsur kementerian lembaga, anggota BKPRN, kementerian lembaga terkait, Bappeda provinsi seluruh Indonesia, perwakilan pemerintah kabupaten kota, akademisi dan lembaga penelitian, asosiasi profesi, pelaku usaha dan LSM dengan jumlah 150 peserta.

2. Welcome Speech

Oleh: Joko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum

Sejak terbitnya UU 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, pemerintah dan pemerintah daerah telah berupaya keras untuk menyelesaikan rencana tata ruang wilayah baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Di tingkat nasional, telah terbit Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagai operasionalisasinya empat Peraturan Presiden tentang RTRW Pulau dan Kepulauan yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, dan Sulawesi serta 5 Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional juga telah diterbitkan. Di tingkat daerah telah terbit 14 Perda RTRW Provinsi dan 293 Perda Kabupaten-Kota, secara substansi hampir semua Pemda Provinsi dan Kabupaten sudah selesai.

Khusus Rencana Tata Ruang Sumatera, inisiatif perwujudannya didorong dengan Roadmap Penyelamatan Ekosistem Sumatera yang merupakan kesepakatan bersama seluruh gubernur se-Sumatera yang pada waktu itu disaksikan oleh Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 November 2008 di Jakarta.

Roadmap Penyelamatan Ekosistem Sumatera ini merujuk pada Visi Ekosistem Sumatera yaitu pembangunan Sumatera yang berkelanjutan berbasis pada konservasi sumberdaya alam.

Saat ini sedang dilaksanakan pula KSN dari fungsi dan daya dukung LH, antara lain RTR Kawasan TN Kerinci Seblat, TN Gunung Leuseur, TN Bukit Tigapuluh, TN Berbak, dan Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh.

Prinsip yang mendasari upaya ini adalah mengintegrasikan berbagai kepentingan antar sektor dan antar wilayah baik di dalam maupun di sekitar KSN.

Tantangan kekinian dan kedepan yang dihadapi adalah upaya pembangunan wilayah dan perdesaan yang sesuai dengan RTRW sekaligus mewujudkan tujuan pengembangan wilayah dan perdesaan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup, hal ini dilakukan melalui perangkat penertiban pemberian perizinan, insentif disintensif dan penegakan hukum, serta penenaan sanksi.

Upaya membumikan berbagai RTRW dan visi penyelamatan ekosistem bukan hanya dilaksanakan oleh satu atau dua sektor saja, tetapi harus sinergis dengan semua pihak atau harus kita lakukan secara inklusif. Untuk itu, diperlukan suatu forum sebagai wadah parapihak yang pagi ini akan diluncurkan dengan nama Forum Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Berkelanjutan atau *Sustainable Regional and Rural Development Forum*

Indonesia. Forum pembangunan ini diharapkan menjadi forum komunikasi antar pihak yang terlibat dalam pembangunan wilayah dan perdesaan, sehingga mendorong perwujudan harmonisasi antara kawasan budidaya dan kawasan lindung, pemantauan pelaksanaan pemanfaatan ruang, berbagi pengalaman dalam rangka peningkatan kapasitas dan media dialog serta publikasi parapihak.

Dalam pelaksanaannya, forum pengembangan wilayah dan perdesaan berkelanjutan ini diharapkan dapat berperan sebagai jembatan untuk mengembangkan kapasitas, dan mentransformasikan penataan ruang perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan parapihak, antara lain:

- a. Perguruan tinggi, jembatan untuk mengembangkan kapasitas, mentransformasikan rencana pembangunan wilayah dan perdesaan kepada parapihak.
- b. Masyarakat; masyarakat kita harus memperhatikan kondisi dan keberadaan sosial budaya masyarakat, hal ini sangat penting, khususnya berkaitan erat dengan praktek-praktek penggunaan lahan masyarakat setempat,
- c. Dunia usaha; forum ini harus dapat mendorong dan membangun komunikasi dengan para pengguna ruang skala besar ini. Karena keterlibatan dunia usaha dalam pengusahaan lahan dapat menjadi pola perubahan penggunaan lahan dan pengembangan wilayah di sekitarnya
- d. Kementrian dan lembaga; bersama kementrian lembaga kita harus dapat mensosialisasikan, memediasi dan menguatkan penegakan hukum dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan untuk layanan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Keynote Speech: Tantangan Pembangunan Berkelanjutan

Oleh: Prof. Emil Salim

Lima tahun yang lalu terbentuk SUDFI; *Sustainable Urban Development Forum Indonesia*, sekarang akan dibentuk SRReDFI; *Sustainable regional and Rural Development Forum Indonesia*. Selama lima tahun tersebut forum memusatkan diri pada isu perkotaan, sekarang yang paling dibutuhkan *Sustainable Regional and Rural Development Forum Indonesia* yang akan memperhatikan isu-isu tata ruang.

Karena itu saya mengajak melihat pembangunan nasional dan global. Apa yang kita hadapi secara global, penduduk naik dari 7 milyar ke 9 milyar, bio kapasitas bumi hanya

menampung 4.7 milyar. Maka jika penduduk adalah 7 milyar kita membutuhkan 1.2 bumi dan jika penduduk naik ke 9 milyar dalam 2050 kita membutuhkan 2 planet bumi.

Maka pesan pentingnya adalah, dari sekarang ke 2050 kita hidup dengan *over exploitation* terhadap bio kapasitasa bumi ini.

Kalau kita perhatikan tanah air kita, 243 juta penduduk sekarang naik ke 316 juta di Tahun 2050 nanti. Apa implikasi dari perkembangan pembangunan tersebut? menurut direktorat jendral PU bahwa provinsi yang mengalami *ecological deficit* adalah; Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, NTB dan seluruh Pulau Jawa.

Jadi sekarang pulau-pulau ini, *ecological footprint*-nya dalam pembangunan sudah melampaui biokapasitasnya, bayangkan pada 2050 tentu akan lebih banyak lagi pulau-pulau di Indonesia yang melampaui biokapasitasnya.

Maka yang terjadi di tanah air kita adalah pembangunan yang tidak berkelanjutan, pembangunan dengan defisit ekologis dengan *progress resources ratio* yang senantiasa naik.

Sikap yang *over eksploitasi* terhadap sumberdaya alam merupakan ciri pembangunan tidak berkelanjutan. Perkebunan kelapa sawit *over eksploitasi* dengan *added value* yang kecil, begitu pula timah tidak ada harganya lagi, tembaga tidak ada harganya lagi.

Apalagi yang menjadi masalah dalam pembangunan kita, ketimpangan regional, sejak puluhan tahun, Jawa-Sumatera-Bali menghasilkan 80% dari PDB, di luar pulau ini, PDB kecil sekali. Mengapa? Karena 80% penduduk Nasional berada di Jawa, Sumatera dan Bali dan karena memiliki penduduk terbanyak maka infrastruktur "lari" ke tiga pulau ini. Jembatan Selat Sunda menjadi penting karena menghubungkan dua pulau yang terbanyak penduduknya sehingga mendorong pembangunan lebih maju lagi di Jawa dan Sumatera yang berarti semakin meningkatkan ketimpangan antara Jawa, Sumatera dan Bali dengan Indonesia bagian timur.

Dalam politik, berlaku *one man one vote*, dan penduduk Indonesia 80% ada di Sumatera Jawa dan Bali maka posisi politik ketiga pulau ini lebih penting lagi. Maka yang disebut sebagai Republik Indonesia efektifnya hanya Jawa, Sumatera dan Bali.

Ini tidak baik untuk menegaskan Negara dari Sabang sampai Merauke, maka ketimpangan regional bersifat struktural dan menghambat mengikuti dominasi penduduk Jawa Sumatera, dan Bali. Isu pembangunan yang dihadapi dalam pembangunan regional adalah struktur Jawa, Sumatera, dan Bali versus non JSB. Ketimpangan kedua adalah ketimpangan *rural* dan *urban*, penduduk mengikuti uang di mana volume uang menumpuk di sektor urban yang fasilitas infrastrukturnya baik, kondisi perbankanya baik, pendidikannya baik, kesehatannya baik, permukimanya baik. Jadi jika kota memiliki

infrastruktur fisik, pendidikan, finansial yang lebih baik maka tidak bisa disalahkan jika penduduk berlari menuju proses urbanisasi. Sektor penting rural tertinggal karena fasilitas yang tidak menarik .

Dari sudut ekonomi, nilai tukar atas apa yang petani berikan dengan apa yang petani terima selalu lebih rendah dari apa yang karyawan terima di kota, fakta-fakta ini ada dan membuat kita faham bahwa proses urbanisasi tidak bisa dibendung.

Apa trend perkembangan ke depan;

Di China yang maju hanya pantai timur, bagian barat tertinggal, di India selatan yang maju utara tertinggal, Vietnam selatan maju, utara tertinggal, di Filipina selatan tertinggal, utara yang maju, RI barat maju, timur tertinggal. Fenomena regional *inbalances* adalah fenomena Asia, tetapi urbanisasi sangat cepat. Tahun 50 hanya ada satu *megacity* yaitu Tokyo, tahun 2010 ada 12 *megacities* dari 23 *megacities* dunia dan tahun 2050 akan lebih banyak lagi.

Fenomena kota-kota di Asia cepat tumbuh dan padat maka ketimpangan rural dan urban akan terus berlanjut di tahun- yang akan datang.

Karena itu, kita perlu secara cepat meneliti ada apa di balik urbanisasi dan ketimpangan. Sebab utama adalah mekanisme pasar yang melanjutkan ketimpangan dalam pembangunan regional dan ketimpangan rural dan urban, karena itu perlu intervensi dari pemerintah untuk mengkoreksi pasar. Pasar jika dibiarkan akan mempertajam ketimpangan ini dan intervensi langsung adalah investasi.

Yang diperlukan adalah investasi dan subsidi pemerintah yang aktif:

- a. Pembangunan infrastruktur
- b. *Intellectual environment*,
- c. *Resources-based enrichment*
- d. *Skill-based rural development* untuk meningkatkan produktivitas dan nilai

tukar petani.

Yang saya harapkan dari SRREDFI maupun SUDFI adalah dimensi pembangunan tidak lagi hanya ekonomi, tetapi ekonomi yang bersifat sustainable. *Social inclusion* dan *environment sustainability* sehingga menuju masyarakat Indonesia yang makmur, adil dan lestari.

4. Keynote Speech: Penguatan Pemantauan dan Pengendalian Pengembangan Wilayah

Oleh: Ketua UKP4, diwakili oleh Deputi 5 UKP4: Tjokorda Nirarta Samadhi

Penataan ruang menjadi salah satu prioritas nasional pada Kabinet Indonesia Bersatu periode ke 2 ini. Terumuskannya RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota secara khusus menjadi sesuatu yang wajib dicapai pada akhir 2014. Isu utamanya adalah kerjasama antara pusat dan daerah. UKP4 selaku unit yang diminta Presiden untuk memastikan RTRW terjadi namun UKP4 hanya dapat melakukan pengawasan pada tingkat kementerian dan lembaga saja atau eksekutif. UKP4 tidak bisa melakukan upaya pengendalian di luar eksekutif padahal rencana tata ruang tidak hanya menjangkau sisi eksekutif.

Berdasarkan hasil pengamatan dari proses pengendalian tataruang di tingkat pusat, ada tiga isu yang penting:

a. Transparansi

Forum ini diharapkan selalu mendorong aspek transparansi, apakah berupa proses penyusunan, atau rencana tata ruang itu sendiri, transparansi harus menjadi aspek yang ditekankan

b. Inovasi

Forum diharapkan menjadi *hub* di mana parapihak bertemu wajib memiliki inovasi sebagai salah satu dasar. Menekankan penggunaan IT sebagai basis di mana kita bisa melakukan transparansi, karena di situ dimulai pengendalian yang sebenar-benarnya, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh pemberi mandat utama, yaitu masyarakat.

Dalam salah satu penugasan dari Presiden adalah REDD+ yang berhubungan dengan sektor kehutanan, memiliki *forest watch*, suatu pendekatan yang didasari suatu inovasi yang memungkinkan semua pihak mengawasi bagaimana kita mengelola hutan. Tidak hanya urusan kehutanan atau daerah tapi jadi urusan kita semua. SRReDFI memiliki tools yang berbasis IT merupakan inovasi yang layak didorong. Jika sistem informasi dari forum ini memiliki substansi yang dalam kita akan coba kaitkan itu dengan *sequester room* Presiden di Bina Graha.

c. Partisipasi

Forum ini adalah forum yang menghubungkan banyak pihak. Forum ini harus semaksimal mungkin mendorong adanya partisipasi dari parapihak. Ada perkembangan baru dalam pengelolaan kawasan hutan, yaitu putusan MK yang mengeluarkan kawasan Hutan Adat dari Kawasan Hutan. Sebagai suatu landmark, ini merupakan sesuatu yang sangat penting, tapi apa langkah selanjutnya adalah lebih penting. Termasuk di

dalamnya mengikutkan kelompok masyarakat dalam proses-proses partisipatif dalam pembangunan berkelanjutan.

Intinya, disamping banyak-banyaknya orang dalam proses partisipasi, tapi bentuk dari partisipasi tersebut harus dipikirkan.

5. Penataan Koridor Rimba

Oleh: Menteri Kehutanan diwakili Direktur Jendral Planologi; Bambang Soepijanto

Terkait dengan peluncuran SRReDFI ini Kementerian Kehutanan *Standing position*-nya sangat mendukung karena hampir 70% luas tapak darat Indonesia adalah Kawasan Hutan untuk pembangunan kehutanan yang lestari.

Kegiatan utama koridor Rimba:

- a. Restorasi hutan alam
- b. Jasa lingkungan karbon, jasa lingkungan air
- c. Perkebunan lestari
- d. Pengelolaan Kehutanan lestari

Kementerian Kehutanan memiliki parameter-parameter untuk pengelolaan koridor Rimba dalam rangka pembangunan wilayah dan perdesaan yang berkelanjutan.

Forum ini menarik karena merupakan forum *policy community* atau sebagai *policy advisor* atau *policy decision making* karena setiap sektor ada acuannya masing-masing, apakah kemunculan komunitas kebijakan ini merupakan syarat untuk merevisi *policy system* atau hanya diskusi? Jika menjadi *policy community* dan akan menghasilkan *policy decision* akan sangat menarik karena saling mengkoreksi. Barangkali dengan forum ini yang akan membuat sistem pembangunan wilayah dan perdesaan menjadi sesuatu yang menarik, tapi jika hanya menjadi ajang berkumpul yang tidak menghasilkan sesuatu untuk solusi Indonesia ke depan maka akan menjadi "waste". Harus menghasilkan sesuatu yang tidak menjadi *dispute*, apakah *dispute* ruang atau apakah *dispute* persepsi akan pembangunan.

Dengan forum ini mudah-mudahan bisa memberikan jalan keluar terhadap sering terjadinya *dispute* dalam kebijakan pembangunan di Indonesia.

6. Komitmen Implementasi Koridor Rimba

Oleh Anggota DPR Dharmasraya

Sepakat dan mendukung sepenuhnya SRReDFI, Dharmasraya sudah mengesahkan perda RTRW. Kerawanan yang selalu menjadi permasalahan dari waktu-ke waktu adalah ketimpangan yang harus menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan yang sebisa mungkin diminimalisir. Jika forum ini hanya sekedar diskusi tanpa ada follow up pengambilan kebijakan

Pleno “Peran SRREDFI dalam Implementasi Program NGO/Lembaga Donor”

7. CEO WWF Indonesia: Dr Efransjah

WWF sangat mendukung bahkan mendukung di depan. Kenapa?

Ada satu-dua *key stakeholder* yang – karena pengetahuan dan informasi yang dimilikinya - bermaksud menguasai dan mendominasi keputusan atas tata ruang atau tata guna lahan. Dengan adanya SRREDFI kita harapkan banyak orang terlibat atau tahu supaya tidak terpinggirkan dalam pengambilan keputusan karena tidak punya akses dan informasi dan pengetahuan.

Forum ini intinya pada transparansi.

Persepsi masyarakat madani; tata ruang harus terbuka karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

WWF sangat menghargai nilai yang diambil oleh multistakeholder yang terlibat dalam forum ini sebagai kelanjutan dari visi Sumatera.

Apa hubungan antara konsep SRREDFI dengan Pembangunan berkelanjutan. Bagian pertama yang paling sulit untuk mencapai keberlanjutan adalah kita harus mampu berfungsi dan bertahan pada tempat yang tetap, kalau tepat bisa saja berubah-ubah. Dengan adanya forum ini yang merupakan wadah dan instrument untuk menyumbang pada *decision making process* dan *control making*. Proses yang fundamental karena bersifat konsultatif; mendengarkan.

Dengan adanya forum ini proses *hearing* sudah bisa diakomodasi.

Menuju ke arah stabilisasi *landuse* yang merupakan fundamen untuk pembangunan berkelanjutan. Jika RTRW sudah disahkan, maka perlu dilakukan *best management practices* pada tiap-tiap unit tata ruang yang akan mewujudkan stabilisasi yang merupakan jalan menuju keberlanjutan.

Kita akan membangun kapasitas untuk memahami produk-produk tataruang → mikro zonasi dan koscek antara di atas peta dan di lapangan.

Jika forum ini berjalan dengan baik, dan ada keikhlasan, biarkan otoritas mengambil keputusan, jika tidak puas ada jalur untuk protes ke pengadilan.

Salah satu dampak dari kegiatan ini adalah mengurangi dampak buruk pembangunan untuk mencapai *social inclusion*.

Bagi WWF civil memandang hal ini sebagai *exercise* yang sehat.

8. USAID IFACS: M Sigit Widodo

Kegiatan ini sangat relevan dan kompatibel dengan kegiatan ifac yang dirancang di skala mikro/kabupaten. Pada saat pertama diajak komunikasi ifacs menyambut baik.

Secara singkat tujuan ifacs: mengurangi deforestasi dan mengurangi emisi.

Sepakat dengan: transparansi, inovasi dan partisipasi.

Forum ini merupakan tawaran bagus dan strategis bagi ifacs.

Relevansi dengan ifacs; GIS & Remote Sensing, IFACS membangun jaringan dan vertica data integration dengan UKP4 dalam onemap

Sigaptaru sangat relevan bisa nyambung dengan kegiatan IFACS di beberapa lokasi.

Kesempatan untuk mainstreaming pembangunan rendah emisi.

Hal strategis: menawarkan bekerja dengan forum multipihak yang sebagian ada sebelum iFACS untuk berjalan bersama bersama SRREDFI.

Diskusi:

a. Mahir Takaka dari Aman

Untuk IFACS

- Setahu saya yang dikembangkan IFACS hampir tidak ada perlindungan dampak eksistensi masyarakat adat?
- Dengan putusan mahkamah konstitusi, di mana hutan adat dikeluarkan dari hutan Negara, kira-kira peluang-peluang pa yang bisa kami manfaatkan dari proyek IFACS terkait penguatan eksistensi masyarakat adat?

Untuk WWF

- Kira-kira apa strategi apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat inisiatif yang sudah ada terkait dengan putusan MK tentang hutan adat, dengan SRREDFI kami

akan banyak mendapatkan tantangan ke depan dalam mendorong implementasi putusan MK tentang posisi hutan adat dan masyarakat adat dalam NKRI

Respon WWF:

Kita melihat sebagai kemajuan, bahwa selama ini hak masyarakat adat dinyatakan tapi tersamar, sehingga sulit atau belum mampu mengangkat harkat dan martabat penduduk setempat atau asli mereka tetap merasa marjinal.

Kita harus menghormati keputusan MK, dan paling penting eksekutif mengambil sikap secara jelas dengan melakukan penyesuaian instrumen yang mengatur hal itu, sepanjang belum dibuat harus "diributkan". Harus terwujud dalam misalnya perda. Walaupun dalam jenjang hirarki perda paling rendah. Yang lebih penting lagi bagaimana masyarakat itu dikondisikan dan ditingkatkan kapasitasnya yang relatif sama dengan pemain lainnya. Posisi kita bersama yang lain harus mendorong pemerintah untuk segera mengatur perangkat pusat dan daerah khususnya dari bottom up dari perda.

Respon IFACS

IFACS mendapatkan masukan karena belum banyak terkait dengan masyarakat adat, namun jika di lapangan ada beberapa kegiatan dengan masyarakat termasuk masyarakat adat. IFACS ada pemetaan partisipatif.

Kami sepakat forum multipihak sangat strategis untuk diseminasi dan sosialisasi hal-hal seperti ini.

b. Yoyoh Indaryanti dari Pusat Studi Pertanian dan Perdesaan IPB

Kita sudah punya kesepahaman bahwa melakukan pembangunan wilayah dan perdesaan tidak hanya dari sisi makro tapi juga dari sisi mikro. Partisipasi: lembaga kami bekerjasama dengan kemendagri dirjen pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mengembangkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat. Permendagri No 51 Tahun 2007. Bekerja di 20 kabupaten. Lebih kepada melakukan training masyarakat khususnya aparat desa. Jika forum ini melibatkan multipihak, forum ini bisa mencakup kesemua stakeholder. Perlu ada penyusunan tataruang desa. Ada kesulitan ketika berbenturan dengan peraturan di atasnya.

Respon WWF:

Benar bahwa jika kita mencari manajemen unit terkecil dalam *governance system* adalah tataruang desa. Yang menjadi persoalan, tidak stabilnya tataruang di tingkat atas, mengandung resiko-resiko perubahan-perubahan. Forum ini terkait kementerian yang sangat vital dalam otorisasi tataruang yaitu PU, dalam negeri, kehutanan. Mestinya merupakan kendaraan konsultasi yang lebih egitimate. Dan kita berharap dipakai juga oleh LSM secara akademik dan advokasi memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang tidak bisa duduk di forum ini. Perlu sekali forum ini mengangkat mereka yang selama ini belum pernah ikut dalam an pengambilan keputusan padahal terkait dengan hajat hidupnya. Kesulitan partisipasi adalah ketiadaan kapasitas.

c. Zainal Arifin dari Kementerian perhubungan

Masalah transportasi tidak ada padahal transportasi penting.

Saya harap forum ini sebagai fasilitasi karena RTRW sebagian banyak yang tidak sesuai peraturan perundangan bidang transportasi.

d. Luthfi Muta'ali dari Fakultas Geografi UGM

Atasnama Fakultas Geografi UGM menyampaikan rasa senang bahagia dan dukungan terhadap terbentuknya SRReDFI.

Harapan kami:

- Bisa mengubah *mindset* dalam sistem perencanaan terutama perencanaan tataruang yang sangat bias kota.
- Sebagai forum *civil society*, bisa menjadi media penyeimbang dalam sistem pengambilan keputusan yang sebelumnya sangat didominasi kelompok-kelompok tertentu.
- Membangun negara ini harus membangun harus dari hulu jika mau sustainable dan harus diikuti oleh semua perangkat perencana di indonesia.

e. Andi Rusandi dari Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, IKementerian kelautan dan perikanan

- Kami apresiasi.
- Seberapa jauh IFACS dan WWF bisa membantu program kami, kami mencoba membuka jaringan. Bagaimana keterlibatan lembaga kami dalam forum ini

- f. M Husni MM dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
- Tertarik dengan pembentukan SRREDFI di mana di kementriankami pembangunan basisnya desa. Dalam pembangunan pertanian tidak terlepas dari konflik-konflik yang terkait dengan lahan. Aturan main bagus namun dalam implementasi tataruang bagaimana, provinsi bagaimana, kabupaten detilnya bagaimana, tatabatas tidak jelas di lapangan. Tatabatas baik administrasi maupun kawasan hutan belum jelas.
 - Menghimbau sejauh mana konteks WWF atau IFACS dalam pembangunan pertanian di perdesaan.

Tanggapan WWF:

- Jika bicara keberlanjutan, salah satu faktor esensial dalam *economic sustainability* adalah transportasi. Yang menjadi persoalan adalah jika sistem transportasi dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip tataruang yang sudah ada, misalnya melalui taman nasional. Transportasi harus ada. Publik memiliki hak bicara tapi otoritas yang memutuskan; *consultative landuse planning*. Kelebihan yang diharapkan dari forum ini adalah konsultasi vertikal dan horizontal. Peraturan jika dibuat semua akan kelihatan tidak sinkron karena dibuat sektoral.
- Pemerintah dibiarkan menjalankan fungsinya, *trias politica modern*: pemerintah, private setor, civil society.
- WWF sangat instrumental di KKP, intinya kita ingin bersama KKP menyejahterakan masyarakat dengan mencegah *overfishing*, *sustainability* dan mencegah tingginya *bycatch*. *Sustainable fisheries* sama pentingnya dengan *sustainable agriculture*.

Tanggapan IFACS

- IFACS hanya didesain 4 tahun dan akan tutup tahun depan. Kami melihat peluang kerjasama dalam forum ini.
- Transportasi dan tatabatas merupakan tantangan kedepan. Tatabatas adalah potensi konflik
- Siapa yang nantinya akan mengimplementasikan di daerah? Rekan di daerah menunggu operasionalisasi.

9. Pertemuan Tahunan SRREDFI

Budi Situmorang:

- Forum dipimpin sekjen
- Organisasi tidak perlu terlalu formal
- Untuk satu tahun ke depan agenda prioritas apa yang akan dilakukan dan dikomunikasikan paa sigaptaru
- Pesan menteri:
 - Perguruan tinggi: Dalam pelaksanaannya forum diharapkan sebagai jembatan untuk mengembangkan kapasitas, mentransformasikan rencana pembangunan wilayah dan perdesaan kepada parapihak.
 - Masyarakat: Harus memperhatikan kondisi dan keberadaan sosial budaya masyarakat khususnya yang berkaitan dengan praktek penggunaan lahan oleh masyarakat.
 - Dunia usaha: Membangun komunikasi dengan para pengguna ruang dalam skala besar, karena keterlibatan mereka dalam perusahaan melalui pola-pola penggunaan lahan, dan menjadi contoh bagi pola di sekitarnya.
 - Pemerintah: mensosialisasikan, memediasi dan menguatkan penegakan hukum dalam melaksanakan kebijakan pembangunan untuk peningkatan pelayanan maupun kesejahteraan masyarakatnya.
 - Pemda: didorong untuk mengendalikan pemanfaatan ruang melalui perijinan yang diberikan sesuai dengan peruntukannya.

Thomas Barano:

- Dipimpin oleh Sekjen dan Wasekjen, dalam pelaksanaan tugas harian dibantu; terkait isu implementasi untuk memfasilitasi dan peningkatan kapasitas proses penataan ruang untuk multipihak, mengkomunikasikan kepada publik lewat media kegiatan-kegiatan perkembangan tataruang dan pengembangan wilayah dan infrastruktur melalui SIGAPTARU, pengendalian memantau pelaksanaan-pelaksanaan di lapangan melalui SIGAPTARU.

Prabianto M Wibowo dari Kementerian Perekonomian:

- Forum harus merefleksikan multisektor dan multilevel
- Forum sifatnya loose, tidak terlalu kaku. Keterwakilan harus dijaga, karena bentuknya forum bisa saja bentuknya jaringan, setiap anggota bisa berbagi informasi atau mensarankan solusi tapi tidak mengeksekusi; memberikan rekomendasi.

- Komunikasi lebih banyak berbasis web. Pertemuan bisa disepakati misalnya setiap enam bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

Luthfi Muta'ali dari Fakultas Geografi UGM

- Faktor eksternal, harapan atau ekspektasi yang cukup besar terhadap forum ini, di sisi lain kita menyadari organisasi ini baru lahir.
- Faktor internal; forum ini memiliki fokus; mencari bentuk, pengurus bertugas mencari bentuk di tahun pertama, memperkuat isu-isu apa yang akan dikerjakan, memperkuat sistem komunikasi di antara kita.
- Organisasi cair dan sukarela.
- Mengangkat Isu-isu utama diangkat untuk memperkuat ketertarikan anggota, misalnya tataruang pulau, MP3EI, isu-isu nasional yang muncul di media harus segera direspon SRREDFI terutama jika terkait tata ruang, memperkuat komunikasi dengan media online, tentang kepengurusan dan struktur sepakat dengan inisiator.
- Mengusulkan, sekjen dirembugkan di antara inisiator untuk tahun pertama. Menyerahkan untuk tahun pertama, sekjen oleh inisiator. Sekjen membentuk struktur organisasi dan kami mengikuti.

Mangarah Silalahi dari Yayasan Burung Indonesia

- Bentuk fleksibel dan cair
- Pertemuan anggota satu tahun terlalu lama, saya usul 6 bulan tapi jika ada hal mendesak bisa diadakan pertemuan tambahan.

Fathi Hanif dari WWF Indonesia

- Lembaga-lembaga yang menggagas pertemuan ini bisa mendelegasikan satu orang dari lembaga tersebut sebagai preesidium untuk tahun pertama. Presidium yang akan menggulirkan forum ini perlahan-lahan dalam diskusi mengenai kelembagaan maupun isu-isu pembangunan berkelanjutan, sampai pertemuan selanjutnya yang lebih kongkrit.
- Antara AD dan Kode Etik dua dokumen terpisah. PR terbesar dari presidium adalah perumusan kode etik, dan pola penyelesaian sengketa jika ada pelanggaran kode etik. Sistematika AD belum lengkap, misalnya kedudukan forum sebetulnya dari sisi hukum menunjuk domisili dari forum, apakah kedudukannya memilih ibukota negara, atau menetap pada keberadaan konstituen terbesar.
- Kode etik dikeluarkan dari materi anggaran dasar; materi sendiri

- Cantelan kode etik masuk di nilai-nilai (pasal 2) ada dua ayat tentang nilai-nilai dan detail nilai-nilai akan dirumuskan dalam kode etik forum. Yang terkait 8 menjadi ayat 1
- Pasal 2 naskah yang lama bisa jadi ayat 1, ayat 2 yang baru bicara lain-lain dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut, akan diatur lebih detail.
- Pasal 2 bicara kedudukan forum, pada umumnya, perumusannya biasanya berbicara domisili.
- Bab 5 letaknya pasal 9 dan 10 dipindahkan letaknya setelah keanggotaan,
- Pasal 12 keanggotaan; masih ada yang kurang, bicara keanggotaan baru bicara latarbelakang, perlu juga dirumuskan bahwa keanggotaan itu mendaftarkan atau didaftarkan (aktif/pasif)
- Ayat berikutnya dalam pasal 12, apakah perlu ada mandat dari institusinya sebagai suatu administrasi yang harus diverifikasi, menjadi ayat tambahan dalam pasal 12.
- Pasal 13, kepengurusan; rumusan yang lama dilengkapi minimalayat selanjutnya, periode kepengurusan misalkan 3 tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu periode.

Budi Situmorang dari Kemen PU:

- Untuk satu tahun pertama dalam bentuk presidium,
- Presidium merumuaskan agenda dalam satu tahun ke depan.

Chaerul Saleh dari ForTRUST

- Agenda: tentang tataruang provinsi kewilayahaan antara Aceh, pada draft pertama sesuai dengan misi
- Membawa isu tataruang ACEH ke tingkat nasional, apakah isu ini bisa didorong oleh forum ini melalui mekanisme BKPRN.

Budi Situmorang dari KemenPU

- Bisakah kita mencari model pembangunan jalan di taman nasional jika terpaksa, misalnya, menerapkan prinsip-prinsip infrastruktur hijau. Kasus di TN Bukit Barisan Selatan.